

BAB I

PENDAHULUAN

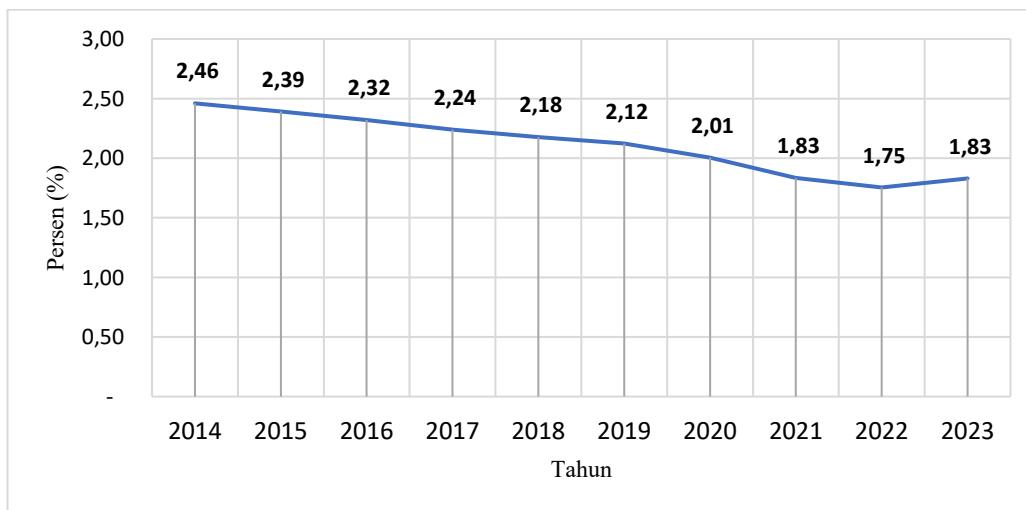
1.1 Latar Belakang

Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan luas wilayah perkotaan terbesar di Asia, setelah Tiongkok dan Jepang. Berdasarkan data *World Bank* (2024), pertumbuhan wilayah perkotaan di Indonesia tergolong pesat, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 4,1%, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Diperkirakan bahwa pada tahun 2025, sekitar 68% penduduk Indonesia akan menetap di kawasan perkotaan.

Urbanisasi adalah salah satu faktor pendorong perkembangan pesat daerah perkotaan, banyak masyarakat melakukan urbanisasi kerena menganggap peluang kerja di kota jauh lebih besar bila dibandingkan dengan wilayah pedesaan, namun urbanisasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan seperti kepadatan penduduk, meningkatnya angka pengangguran kota, meningkatnya angka kemiskinan kota, kriminalitas, pencemaran lingkungan, serta munculnya pemukiman kumuh (Harahap, 2013; Malau, 2013; Hidayati, 2021).

World Bank (2024) menyatakan bahwa perkembangan urbanisasi yang cukup pesat di Indonesia memberikan dampak perkembangan wilayah dan menjadikan banyak masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Jumlah lahan perkotaan di Indonesia meningkat sekitar 1,1% per tahun antara tahun 2000 dan 2010, dari sekitar 8.900 km² menjadi 10.000 km², yang merupakan peningkatan terbesar setelah Tiongkok.

Urbanisasi memberikan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara yang memiliki keterkaitan ekonomi dengannya. Sebagaimana dijelaskan oleh *World Bank (2024)*, banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi seiring dengan berkembangnya kawasan perkotaan, yang ditandai oleh peningkatan lapangan kerja formal dan produktivitas. Setiap kenaikan urbanisasi sebesar 1% dikaitkan dengan pertumbuhan PDB perkapita sebesar 13% di India, 10% di Tiongkok, dan 7% di Thailand. Namun, di Indonesia, dampak positif tersebut tidak optimal karena kurangnya investasi dalam infrastruktur, yang menyebabkan berbagai masalah seperti kemacetan, pencemaran, kerusakan lingkungan, serta bencana alam seperti banjir. Akibatnya, setiap pertumbuhan urbanisasi 1% di Indonesia hanya mampu mendorong pertumbuhan PDB sebesar 4%. Grafik di bawah ini menunjukkan tren laju urbanisasi di Indonesia selama kurun waktu 2014 hingga 2023.



Gambar 1. 1 Tingkat urbanisasi Indonesia tahun 2014-2023 (%) Pertumbuhan Tahunan)

Sumber data : *World Bank* (data diolah), 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat urbanisasi di Indonesia mengalami tren yang menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 10 tahun (2014-2023), dengan rata-rata penurunan sekitar 0,07%. Pada tahun 2014, tingkat urbanisasi di Indonesia menyentuh angka sekitar 2,46%, sedangkan pada tahun 2023 angka tersebut mengalami penurunan sekitar 0,63% hingga angka urbanisasi berubah menjadi 1,83%, dengan angka urbanisasi terkecil terjadi pada tahun 2022 karena pada tahun ini Indonesia masih dalam fase pemulihan setelah COVID-19, selama pandemi berlangsung terjadi fenomena *urban exodus*, di mana banyak orang kembali ke desa karena kehilangan pekerjaan di kota, penutupan aktivitas ekonomi, dan ditutupnya akses transportasi seperti stasiun, bandara, dan fasilitas transportasi lainnya, sehingga hal tersebut membuat proses migrasi desa-kota berlangsung secara lambat.

Namun, jika melihat realitas lapangan, urbanisasi di Indonesia sebenarnya terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, penurunan tingkat urbanisasi yang terdapat dalam data diakibatkan oleh beberapa hal seperti, jumlah penduduk perkotaan yang lebih besar dari jumlah penduduk pedesaan, dan penurunan jumlah penduduk desa seiring dengan meraknya migrasi desa ke kota sehingga hal ini membuat pergerakan urbanisasi berlangsung lambat.

Pergerakan urbanisasi di Indonesia terjadi karena beberapa faktor Diputra & M.Arsha (2023) Terdapat berbagai aspek yang memengaruhi terjadinya urbanisasi, khususnya migrasi penduduk dari wilayah pedesaan menuju kawasan perkotaan. Aspek-aspek tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori utama yakni unsur penekan dari daerah asal dan unsur pemikat dari daerah tujuan. Di antara lokasi asal dan tempat yang dituju, terdapat variabel tambahan yang turut berperan dalam

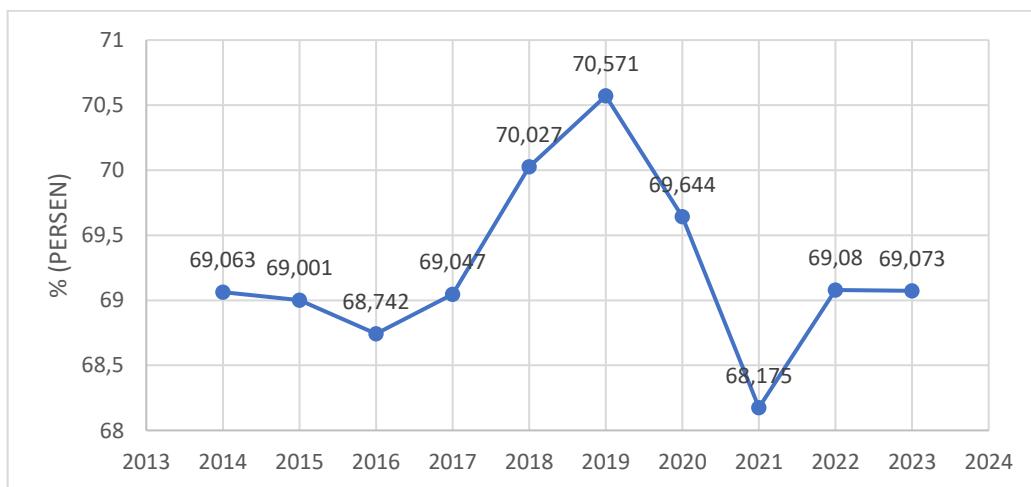
memengaruhi proses perpindahan tersebut. Unsur penekan, unsur penarik, serta variabel penghubung dipertimbangkan guna memahami dan menentukan keputusan individu untuk bermigrasi atau tetap tinggal.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa meningkatnya urbanisasi di Indonesia dipengaruhi oleh ketimpangan dalam ketersediaan lapangan pekerjaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Perkotaan cenderung menawarkan lebih banyak pekerjaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan, wilayah perkotaan juga cenderung memberikan lapangan pekerjaan yang lebih beragam karena umumnya wilayah perkotaan menawarkan lebih banyak sektor perekonomian sebagai contoh sektor industri, perdagangan dan jasa, sedangkan wilayah pedesaan terkadang hanya bergantung pada satu sektor yaitu sektor pertanian, yang tidak pasti karena sektor ini sangat bergantung pada keadaan iklim dan cuaca, hal ini berdasarkan pada Haris (2015) Seperti yang telah diketahui, suatu kota dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimilikinya pasti menyediakan lapangan kerja yang jauh lebih beragam jenisnya dibandingkan dengan daerah pedesaan di mana mayoritas orang bekerja di sektor pertanian.

Jenis pekerjaan yang lebih bervariasi dan lebih banyak di daerah perkotaan inilah yang mampu menjadi daya tarik masyarakat untuk melakukan urbanisasi dalam upaya memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka, Maulidiyah *et al.*, (2024) keterbatasan infrastruktur yang kurang memadai dibandingkan dengan perkotaan menjadi alasan utama terjadinya urbanisasi. Pekerjaan yang tersedia di pedesaan umumnya sangat terbatas, yang sering kali tidak dapat memberikan jumlah lapangan pekerjaan yang cukup bagi masyarakat desa, namun sebaliknya, wilayah perkotaan menawarkan peluang kerja

yang lebih banyak serta beragam sehingga membuat masyarakat tertarik untuk melakukan urbanisasi.

Studi yang dilakukan oleh Anita & Sentosa (2021) menemukan bahwa PAK di daerah perkotaan, lebih tinggi daripada daerah pedesaan, ini mencerminkan bahwa adanya lebih banyak peluang kerja dibandingkan dengan pedesaan. Hal ini menyebabkan migrasi desa-kota meningkat secara signifikan, karena penduduk usia produktif mencari pekerjaan yang tidak tersedia di desa mereka. Sejalan dengan itu, Sumbaga *et al.*, (2023) menyebutkan bahwa variabel kesempatan kerja di perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan urbanisasi semakin banyak lapangan kerja yang tersedia di kota, semakin besar kemungkinan penduduk desa untuk bermigrasi ke wilayah perkotaan untuk mencari pekerjaan.



**Gambar 1. 2 Partisipasi angkatan kerja (PAK) Indonesia tahun 2014-2023
(% dari Total Populasi Usia 15-64 Tahun)**

Sumber data : *World Bank* (data diolah), 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, partisipasi angkatan kerja (PAK) di Indonesia selama periode 2014 hingga 2023 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2014, PAK berada pada angka 69,06% dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing menjadi 69,00% dan

68,74%. Penurunan ini mengindikasikan adanya kecenderungan menurunnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik karena memilih tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan. Berdasarkan laporan (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia., 2016) yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi angkatan kerja selama periode tersebut disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja formal, terutama bagi perempuan dan lulusan pendidikan menengah ke atas. Selain itu, sektor informal yang mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional juga dinilai kurang memberikan insentif ekonomi yang menarik bagi pencari kerja baru.

Setelah tahun 2016, PAK kembali menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, nilai PAK mencapai 69,05%, kemudian meningkat secara berkelanjutan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 sebesar 70,57%. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional serta tumbuhnya lapangan kerja akibat investasi infrastruktur dan ekspansi industri manufaktur. Pemerintah juga menjalankan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi tenaga kerja, seperti program pelatihan vokasi dan pengembangan kompetensi kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), serta inisiatif digitalisasi ketenagakerjaan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019b)

Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam pada PAK menjadi 69,64%, dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 68,17%. Penurunan drastis ini erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi, pemutusan hubungan kerja, serta meningkatnya jumlah pekerja tidak aktif atau sementara tidak bekerja. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik

(2020), pada Agustus 2020 tercatat sekitar 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi, baik karena menjadi penganggur, sementara tidak bekerja, maupun mengalami pengurangan jam kerja. Hal ini mencerminkan bagaimana krisis kesehatan global memberikan tekanan besar terhadap pasar tenaga kerja nasional dan mempengaruhi keikutsertaan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi produktif (Badan Pusat Statistik, 2020)

Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, PAK mulai menunjukkan tanda pemulihan pada tahun 2022 dan 2023, dengan nilai yang kembali naik menjadi 69,08% dan 69,07%. Berdasarkan pada Badan Pusat Statistik, (2023b) Pemulihan ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru melalui pemulihan sektor-sektor ekonomi seperti sektor industri manufaktur dan jasa, serta keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional. Dan (Badan Pusat Statistik, 2023b) juga melaporkan bahwa pada Februari 2023, jumlah angkatan kerja meningkat 2,61 juta orang dibanding tahun sebelumnya, dan PAK mengalami kenaikan sebesar 0,24 poin, mencerminkan membaiknya iklim investasi dan aktivitas ekonomi.

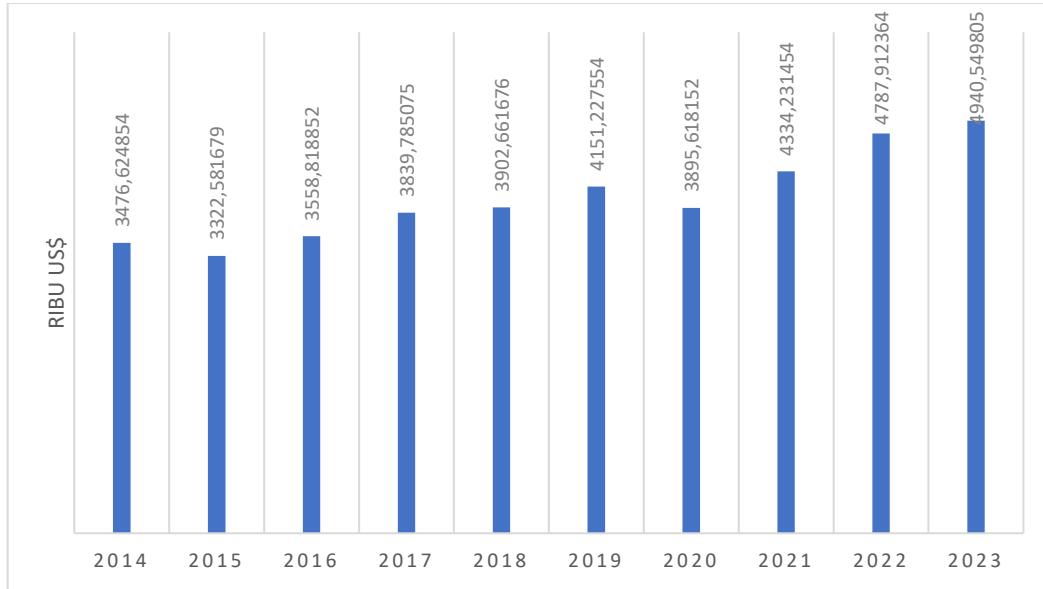
Selain itu, meningkatnya digitalisasi dan ekonomi berbasis teknologi selama masa pandemi turut membuka peluang kerja baru bagi kelompok usia produktif, termasuk pekerja muda dan perempuan, meskipun kesenjangan partisipasi gender dalam angkatan kerja masih menjadi tantangan tersendiri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

Menariknya, peningkatan PAK pada 2019 tidak diikuti oleh kenaikan urbanisasi pada tahun tersebut juga. Berdasarkan teori, kenaikan PAK seharusnya

berbanding lurus dengan peningkatan urbanisasi, karena meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di wilayah perkotaan.

Selain PAK, pendapatan perkapita adalah faktor lain yang dapat memengaruhi perkembangan urbanisasi. Industrialisasi, pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan penduduk adalah beberapa faktor yang memengaruhi urbanisasi (Denyawan & Mustika, 2024). Pendapatan perkapita masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan tergolong tinggi, tingkat pendapatan perkapita memiliki peranan dalam mendorong laju urbanisasi, salah satu pendorong utama bagi individu dalam melakukan urbanisasi adalah keinginan untuk mendapatkan gaji tinggi, dan daerah perkotaan umumnya memiliki peluang kerja yang lebih banyak dan menawarkan gaji yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sehingga hal tersebut menciptakan sebuah harapan bahwa dengan pindah ke daerah perkotaan seseorang tersebut dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui peningkatan pendapatan, hal tersebut pula mendorong perolehan pendapatan perkapita masyarakat kota menjadi lebih besar, hal ini berdasarkan pada Wulandari (2017) Penurunan laju urbanisasi dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan perkapita; salah satu motivasi individu untuk urbanisasi adalah harapan untuk memperoleh tingkat upah yang lebih tinggi di kota. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Thuat Pham & Thuy Cu (2024) rata-rata pendapatan perkapita Disebabkan perbedaan pendapatan, urbanisasi muncul di daerah perkotaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Pendapatan perkapita mengalami fluktuasi tiap tahunnya, berikut data pendapatan perkapita Indonesia tahun 2014-2023.



Gambar 1.3 Pendapatan perkapita tahun 2014-2023 (Ribu dollar US\$)

Sumber data: *World Bank* (data diolah), 2025.

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, pendapatan perkapita Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2014 hingga 2023. Pada tahun 2014, pendapatan perkapita tercatat sebesar 3.476,62 ribu USD dan menurun pada tahun 2015 menjadi 3.322,58 ribu USD. Penurunan ini berkaitan dengan tekanan ekonomi global akibat melemahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara dan minyak sawit, serta depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup signifikan terhadap dolar AS. Nilai tukar rupiah pada 2015 sempat menyentuh angka di atas Rp14.000 per dolar AS, yang menyebabkan biaya impor meningkat dan daya beli masyarakat menurun (Bank Indonesia, 2015)

Memasuki periode 2016 hingga 2019, pendapatan perkapita menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, dari 3.558,81 ribu USD pada 2016 menjadi 4.151,22 ribu USD pada 2019. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi domestik, yang didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, investasi langsung, serta stabilnya inflasi dan nilai tukar (*World Bank*, 2020) Pemerintah juga mulai memperkuat kebijakan struktural melalui paket-paket deregulasi dan

reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019a)

Pada tahun 2020, terjadi penurunan pendapatan perkapita menjadi 3.895,56 ribu USD. Hal ini disebabkan oleh kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penurunan konsumsi rumah tangga, dan anjloknya kegiatan investasi menyebabkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,07% (Badan Pusat Statistik, 2021)

Namun demikian, pada tahun 2021 hingga 2023, pendapatan perkapita kembali menunjukkan tren peningkatan, masing-masing mencapai 4.334,23 ribu USD pada 2021, 4.787,91 ribu USD pada 2022, dan 4.940,54 ribu USD pada 2023. Pemulihan ini terjadi berkat percepatan program vaksinasi nasional, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, serta pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara bertahap (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022) Selain itu, upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri seperti nikel serta peningkatan ekspor manufaktur turut berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan perkapita di tahun-tahun terakhir (World Bank, 2023)

Berdasarkan data pendapatan perkapita yang ada di atas menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dengan teori, terdapat beberapa tahun yang menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi mengalami keterkaitan dengan pendapatan perkapita sebagai contoh pada tahun 2020 angka pendapatan perkapita mengalami penurunan dari tahun 2019 dan tingkat urbanisasi di Indonesia juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2019 angka urbanisasi berkisar di angka 2,12%, mengalami penurunan sekitar 0,11% di tahun 2020 sehingga angka

urbanisasi mencapai 2,01%, hal ini memiliki kesamaan pernyataan dan teori yang menyatakan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap urbanisasi di Indonesia.

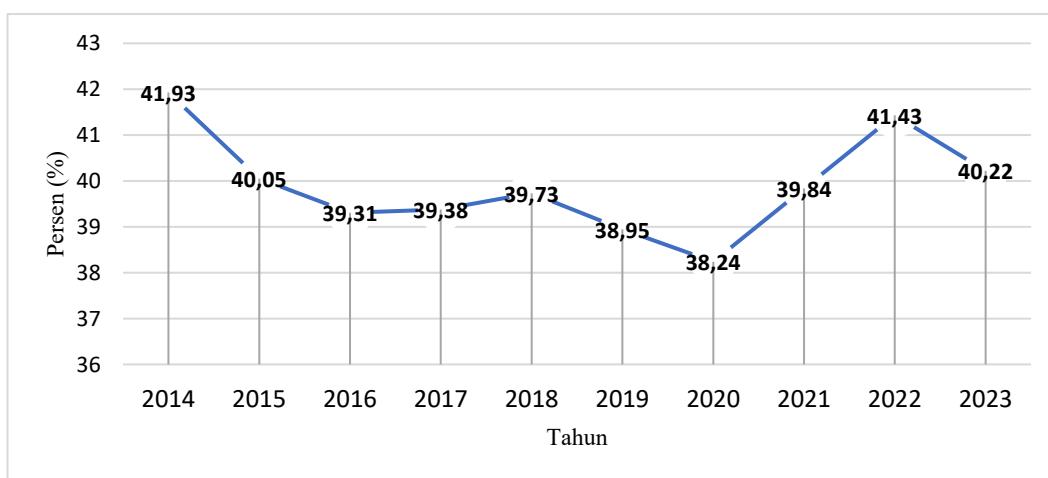
Terjadinya urbanisasi di Indonesia salah satunya disebabkan karena sektor perekonomian yang mulai berubah, pada awalnya masyarakat Indonesia lebih berfokus pada sektor pertanian yang lebih berkembang di wilayah pedesaan namun dewasa ini sektor pertanian mengalami penuruna sedangkan sektor industri terus mengalami peningkatan secara konsisten tiap tahunnya, sektor industri merupakan sektor perekonomian yang cenderung mengalami perkembangan di daerah perkotaan, sehingga berkembangnya sektor industri di Indonesia memberikan pendorong terjadinya migrasi desa-kota sehingga menimbulkan proses urbanisasi, hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan Brückner (2012) Hasil penelitian menunjukkan pengurangan angka penambahan di sektor pertanian berkontribusi terhadap meningkatnya pergerakan migrasi desa kota di kawasan Afrika. kemudian penelitian Glaeser (2014) juga menunjukkan bahwa lemahnya perkembangan sektor pertanian dapat menjadi faktor pendorong urbanisasi, terutama di negara dengan ekonomi yang terbuka, diikuti pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rahmatullah & Khaerudin (2021) yang menyatakan bahwa industrialisasi adalah proses yang melibatkan perubahan sosial ekonomi dan ditandai dengan transformasi mata pencaharian dari agraris ke industri.

Dianggap memiliki kesempatan kerja yang lebih besar di kota-kota, sehingga membuat terjadinya urbanisasi. Industrialisasi menyebabkan banyak kesempatan kerja di kota ini. Masyarakat desa datang ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih beragam dan gaji yang lebih besar. Singkatnya, industrialisasi di kota menyebabkan urbanisasi. Individu atau kelompok pindah dari desa ke kota karena

ada lapangan kerja yang lebih besar di berbagai industri (Rahmatullah & Khaerudin, 2021).

Industrialisasi memaikan peran penting sebagai salah satu pendorong migrasi penduduk desa-kota. Adanya permintaan tenaga kerja di sektor industri yang mengalami perkembangan pesat di daerah perkotaan membuat masyarakat pedesaan tertarik untuk pindah dan mencari pekerjaan di daerah perkotaan, Hal ini berdasarkan pada Mustapita & Khalikussabir (2019) sektor industri yang berkembang pesat di daerah perkotaan membuat banyak penduduk lebih memilih untuk bermigrasi ke daerah perkotaan yang memang memiliki peluang kerja yang lebih besar di sektor industri.

Angka industrialisasi di Indonesia mengalami fluktuasi yang beragam berikut gambaran data industrialisasi yang disajikan dalam bentuk grafik selama periode 2014-2023.



Gambar 1.4 Industrialisasi Indonesia tahun 2014-2023 (% nilai tambah PDB)
Sumber: *World Bank* (data diolah), 2025

Berdasarkan data yang terdapat dalam gambar 1.4 dapat di jelaskan bahwa industrialisasi di Indonesia mengalami fluktuasi selama priode 2014-2023, yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang beragam,

berdasarkan gambar, angka industrialisasi tertinggi tercatat pada tahun 2014 dengan angka sebesar 41,93%, karena berdasarkan dengan yang disampaikan oleh BPS memperlihatkan angka pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2014 relatif stabil, dengan laju pertumbuhan mencapai 5,01%, stabilitas perekonomian ini memberikan dorongan positif pada aktivitas industri dan investasi.

Kemudian angka industrialisasi terbesar berikutnya terletak pada tahun 2022, meskipun pada tahun ini Indonesia baru saja mengalami pemulihan pasca pandemi COVID-19, namun beberapa kebijakan pemerintah seperti keringanan pajak dan memberikan bantuan berupa subsidi kepada para pelaku usaha industri, memberikan pelatihan, dan bantuan modal, serta program “*bangga buatan Indonesia*” yang bertujuan untuk mendorong konsumsi produk lokal guna mendukung industri kecil dan menengah

Kemudian pada tahun 2023 angka industrialisasi kembali mengalami penurunan, berdasarkan situs resmi Setkab.co.id (2024) menyebutkan bahwa penurunan angka industrialisasi pada tahun 2023 diakibatkan oleh menurunnya permintaan global untuk produk ekspor Indonesia membuat hal tersebut berdampak langsung pada sektor industri pengolahan, selain itu ketidakpastian global juga merupakan salah satu hal yang membuat angka industrialisasi mengalami penurunan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Antara News (2023) ketidakpastian ekonomi global, termasuk potensi resesi di beberapa negara besar, mempengaruhi permintaan ekspor dan investasi asing langsung, memberikan dampak negatif kepada sektor industri di Indonesia.

Berdasarkan data dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat industrialisasi di Indonesia sejauh ini belum berhasil stabil sebab masih banyak

penurunan-penurunan yang terjadi tiap tahunnya, dan terdapat kesesuaian antara data dan teori pada tahun-tahun tertentu sebagai contoh pada tahun 2020 angka urbanisasi menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,11% sehingga angka urbanisasi menyentuh angka sebesar 2,01% dan angka industrialisasi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 38,24% mengalami penurunan sekitar 0,71% kesesuaian ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara urbanisasi dengan industrialisasi di Indoensia, namun dalam hal ini angka industrialisasi yang tidak stabil juga dapat memunculkan berbagai dampak dan permasalahan di daerah kota, sebab sebagian besar penduduk yang melakukan urbanisasi bergantung pada lapangan pekerjaan yang di sediakan oleh sektor industri, sehingga hal tersebut membuat hadirnya permasalahan seperti yang disampaikan oleh Denyawan & Mustika (2024) Apabila seseorang melakukan urbanisasi dan kota tidak menyediakan lapangan pekerjaan maka hal tersebut dapat menyebabkan pemukiman kumuh, peningkatan kriminalitas, dan peningkatan pengangguran.

Berdasarkan pada fenomena urbanisasi yang terjadi di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai urbanisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya agar dapat menanggulangi permasalahan akibat proses urbanisasi yang tidak terkontrol, dalam hal ini peneliti akan mengkaji serta meneliti beberapa faktor urbanisasi yang berjudul ***Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan Perkapita, & Industrialisasi Terhadap Urbanisasi di Indonesia*** dengan metode ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*) dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 33 tahun (1991-2023). Hasil penelitian ini di harapkan dapat

menjadi acuan pemerintah dan para pemangku kebijakan dalam menanggulangi permasalahan urbanisasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek partisipasi angkatan kerja terhadap urbanisasi di Indonesia?
- 2) Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pendapatan perkapita terhadap urbanisasi di Indonesia?
- 3) Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka industrialisasi terhadap urbanisasi di Indonesia?
- 4) Bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek partisipasi angkatan kerja, pendapatan perkapita dan industrialisasi terhadap urbanisasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah perumusan masalah yang selaras dengan tujuan penelitian ini.

- 1) Untuk menganalisis pengaruh jangka Panjang dan jangka pendek tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap urbanisasi di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh jangka Panjang dan jangka pendek pendapatan perkapita terhadap urbanisasi di Indonesia.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh jangka Panjang dan jangka pendek industrialisasi terhadap urbanisasi di Indonesia.

- 4) Untuk menganalisis dampak industrialisasi, pendapatan perkapita, dan partisipasi angkatan kerja terhadap urbanisasi di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan demografi, dengan cara:

- 1) Menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi di Indonesia.
- 2) Menguji dan mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan urbanisasi, seperti teori migrasi, teori pertumbuhan ekonomi, dan teori industrialisasi.
- 3) Menjadi dasar referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas aspek serupa, baik dalam skala nasional maupun regional.
- 4) Memvalidasi hubungan antara partisipasi angkatan kerja, pendapatan perkapita, dan industrialisasi terhadap urbanisasi dengan menggunakan data empiris terbaru.
- 5) untuk studi-studi lanjutan yang terkait dengan ekonomi, demografi, dan urbanisasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan studi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang konkret untuk sejumlah kalangan, antara lain:

- 1) Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Memberikan dasar dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola urbanisasi, misalnya dalam

perencanaan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, serta kebijakan pemerataan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan.

- 2) Pelaku Industri dan Dunia Usaha: Memberikan gambaran mengenai dampak industrialisasi terhadap urbanisasi, sehingga dapat membantu sektor industri dalam menentukan strategi investasi dan ekspansi usaha.
- 3) Masyarakat Umum: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi, membantu orang dalam membuat keputusan tentang migrasi dan peluang kerja di perkotaan.
- 4) Akademisi dan Peneliti: Menjadi referensi bagi studi lebih mendalam mengenai urbanisasi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhinya, baik di Indonesia maupun di negara lain yang memiliki karakteristik serupa.